KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Laporan Dari Hungaria : DPR Lobi Bea Masuk Kopi ke Budapest
Tanggal : Sabtu, 16 Maret 2019
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 9

LAPORAN DARI HUNGARIA

DPR Lobi Bea Masuk Kopi ke Budapest

Bisnis, BUDAPEST — Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR meminta Parlemen Hungaria untuk mempermudah perdagangan Indonesia dan negara Eropa Tengah tersebut.

Hendri Tri W. Asworo
hendri.asworo@bisnis.com

Indonesia bisa mengimpor gandum dari Hungaria, sebaliknya Hungaria berpotensi membutuhkan kopi dari Indonesia.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dave Akbarshah Fikarno menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memiliki keunggulan dalam bidang industri makanan olahan, seperti mi instan. Menurutnya, mi instan dari Indonesia sudah terdistribusi secara global dan memiliki pabrik di Eropa.

"Di samping itu, permintaan gandum di Indonesia saat ini cukup tinggi sehingga sangat mungkin tercipta peluang baru bagi Indonesia dan Hungaria," ujarnya dalam jamuan makan siang dengan Parlemen Hungaria, Kamis (14/3).

Ketua Badan Kerja Sama Ekonomi Regional BKSAP DPR Juliari Batubara menyampaikan bahwa impor gandum dari Hungaria tidak akan dikenakan bea masuk. "Tetapi apabila Indonesia melakukan ekspor kopi kemasan ke Hungaria, apakah akan diberlakukan kebijakan serupa oleh Pemerintah Hungaria," ujarnya.

Anggota Parlemen Hungaria Lajos Olah mengatakan bahwa kebijakan perdagangan Hungaria tidak bisa sepenuhnya diterapkan sesuai keinginan Hungaria. "Sebab saat ini Hungaria adalah bagian dari Uni Eropa sehingga harus mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Uni Eropa mengenai perdagangan. Oleh karena itu, perlu dibicarakan lebih lanjut oleh parlemen Hungaria apakah bisa melakukan kebijakan yang resiprokal dengan Indonesia," tuturnya.

Merespons jawaban Lajos Olah, Juliari bertanya mengenai keuntungan yang optimal dari keanggotaan Hungaria di Uni Eropa. Dia memberikan contoh bahwa ternyata Hungaria tidak bisa menentukan kebijakan perdagangan sendiri dan harus mengikuti ketentuan Uni Eropa.

"Bukankah hal ini cukup menyusahkan Hungaria? Hal ini penting untuk ditanyakan, mengingat Indonesia dalam konteks Asean juga perlu untuk mempersiapkan diri menghadapi Asean Economic Community [Masyarakat Ekonomi Asean]," katanya.

Neraca perdagangan RI–Hungaria selama 4 tahun terakhir (2015–2017), Indonesia masih surplus.

Menanggapi Juliari, Lajos Olah mengatakan bahwa lebih banyak keuntungan yang mereka peroleh jika tetap bersama Uni Eropa. Misalnya, peluang dalam hal pendidikan yang terbuka luas bagi masyarakat Hungaria jika ingin menempuh pendidikan di kawasan Eropa.

Selain itu, sambungnya, ada peluang ekonomi bagi masyarakat Hungaria yang ingin berkerja di kawasan Eropa. "Keanggotaan dalam Uni Eropa memberikan kesempatan bagi pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sehingga disparitas antara negara-negara anggotanya tidak jauh. Inilah salah satu keunggulan dari integrasi regional," tuturnya.

Badan Kerja Sama Antar Parlemen juga melakukan agenda pertemuan dengan pemangku kepentingan di bidang ekonomi. BKSAP bertemu dengan Lajos Olah sebagai Ketua Grup Persahabatan Indonesia—Hungaria dan Istvan Simicsko selaku Ketua Grup Persahabatan Asean—Hungaria.

Juliari Batubara menyampaikan bahwa Hungaria adalah mitra dagang yang cukup penting bagi Indonesia di Eropa. Namun, selama 5 tahun terakhir, volume perdagangan antara kedua negara turun. Oleh karena itu, parlemen kedua negara itu duduk bersama dan berdialog untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan dalam perdagangan.

"Di samping itu, kedua negara juga hendaknya tetap mengutamakan pendekatan multilateral dan mengutamakan dialog yang didasari oleh saling menghormati dan menghargai antarnegara dalam mencari solusi bagi permasalahan perdagangan internasional, terutama di tengah menguatnya sentimen proteksionisme dan perang dagang antara dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan China," ujarnya di Gedung Parlemen Hungaria.

Istvan Simicsko mengatakan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis dan penting bagi Hungaria. Oleh karena itu, dia sepakat bahwa kedua negara harus aktif berkomunikasi dalam rangka meningkatkan hubungan dagang dan menyelesaikan permasalahan seputar perdagangan.

Menurutnya, Pemerintah Hungaria menyediakan insentif pajak dan fiskal ataupun insentif lainnya bagi perusahaan Indonesia yang ingin melakukan investasi di negera bangsa Magyar tersebut. "Demikian halnya jika ada perusahaan Hungaria yang ingin melakukan investasi, terutama jika berkaitan dengan usaha berbasis teknologi.

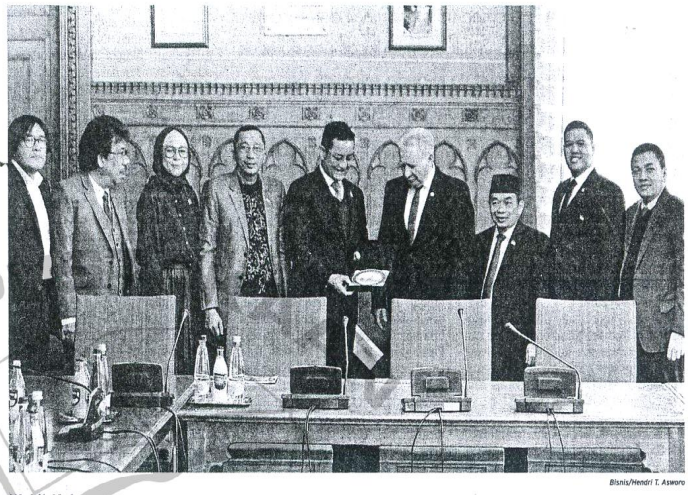

Bisnis/Hendri T. Asworo

Wakil Ketua BKSAP DPR RI dan Ketua Panja Kerja Sama Ekonomi Regional (KER) Juliari P. Batubara (*kelima dari kiri*) menyerahkan cendera mata kepada Wakil Ketua Hungarian National Assembly Jakab Istvan di Budapest, Hungaria, Jumat (15/3). Kedua parlemen sepakat untuk mendorong kerja sama di bidang perekonomian, khususnya perdagangan, investasi, teknologi, dan pariwisata.

SURPLUS PERDAGANGAN

Berdasarkan data Eurostat, nilai perdagangan RI—Hungaria selama 3 tahun terakhir (2015—2017) mengalami *rebound*. Pada 2015, nilai perdagangan mencapai 197,38 juta euro dan turun 7,6% menjadi 182,38 juta euro pada 2016 karena terdampak krisis Eropa.

Namun, 1 tahun kemudian, nilai perdagangan kedua negara menguat kembali sebesar 6,20% menjadi 193,69 juta euro. Pada periode yang sama, ekspor Indonesia ke Hungaria menunjukkan tren stagnan, yaitu rerata tumbuh sebesar 0,65% per tahun.

Sebaliknya, impor Indonesia dari Hungaria menunjukkan tren penurunan 6,82% per tahun. Surplus perdagangan selalu berada di pihak Indonesia, yaitu senilai 118,67 juta euro (2017). Jika dilihat secara kumulatif, nilai perdagangan RI—Hungaria untuk periode Januari—November 2018 tercatat 176,11 juta euro. Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia ke Hungaria senilai 138,77 juta, sedangkan impor 37,34 juta euro. Angka tersebut menunjukkan surplus perdagangan bagi pihak Indonesia sebesar 101,43 juta euro.

Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR bertemu dengan parlemen Hungaria (Hungarian National Assembly) untuk mempererat kerja sama antarparlemen.

Pada pertemuan yang dilakukan di Gedung Parlemen Hongaria (Országház), Kamis (14/3), kedua parlemen menyepakati untuk saling mempermudah kerja sama bidang ekonomi, khususnya investasi, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata.

Wakil Ketua BKSAP dan Ketua Panja Kerja Sama Ekonomi Regional Juliari P. Batubara, Wakil Ketua Panja KER Dave Akbarshah Fikarno, anggota Panja KER Ono Surono, dan anggota Panja KER Dwie Aroem Hadiatie. Selain itu, anggota Panja KER Jon Erizal, anggota Panja KER Jazuli Juwaini, anggota Panja KER Achmad Farial, dan anggota Panja KER Gede Syamsul Mujahidin. Dari parlemen Hungaria disambut Wakil Ketua Hungarian National Assembly Jakab Istvan.

Juliari menyampaikan, sebagai negara anggota G-20, Indonesia membutuhkan Hungaria untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Hungaria merupakan negara di kawasan Eropa Tengah yang menjadi pintu masuk perdagangan Indonesia. "Indonesia dan Hungaria bisa berbagi untuk menjalankan peluang kerja sama ekonomi di tengah liberalisasi perdagangan dunia."

Jon Erizal menambahkan, hasil dari pertemuan tersebut diharapkan akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim kecil karena para anggota yang ikut terdiri dari lintas komisi di DPR. ■